

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Teki Pangalo¹, Debby. Ch. Rotinsulu², Steeva Y. L. Tumangkeng³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Raturangi, Manado 95115, Indonesia

Email: tekipangalo061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan di Indonesia yang meliputi kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya terutama di wilayah perdesaan. Untuk itu perlu adanya andil dari pemerintah pusat maupun daerah dalam penyaluran dan pengelolaan anggaran atau Dana Desa secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Desa serta bagaimana dampaknya secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan Gemeh kabupaten Kepulauan Talaud. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder Dana Desa tahun 2015 sampai tahun 2017 dan data primer yang diambil secara langsung melalui koesioner. Dan analisis yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa yang ada di Kecamatan Gemeh kabupaten kepulauan Talaud secara efektif dengan nilai diatas 100 persen yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki tingkat efektivitas serta memiliki dampak yang positif secara langsung kepada masyarakat di kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kata Kunci : Dana Desa dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Community welfare is a benchmark in assessing the success of development in Indonesia, which includes the condition of fulfilling the material, spiritual and social needs of citizens in order to live properly and be able to develop themselves so that they can carry out their social functions, especially in rural areas. For this reason, there needs to be a contribution from the central and regional governments in the effective distribution and management of the Village Budget or Village Fund. This study aims to determine the level of effectiveness of the utilization of the Village Fund and how it directly impacts the level of welfare of the people in the gemeh district of the Talaud archipelago. The data used in this study is in the form of secondary data from the Village Fund from 2015 to 2017 and the primary data taken directly through questionnaires. And the analysis used is descriptive statistical analysis. Based on the results of this study indicate that the Village Fund is located in the Gemeh sub-district of the Talaud Archipelago Regency effectively with a value above 100 percent which states that the Village Fund has a level of effectiveness and has a direct positive impact on the community in the Gemeh district of the Talaud archipelago.

Keywords : Village funds and the level of community

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3).

Pembangunan Desa mencakup pembangunan di segala aspek baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa merupakan suatu proses dalam rangka meningkatkan kemampuan dari penduduk desa itu sendiri dalam segala aspek baik sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa itu sendiri.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Namun realita yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia saat ini adalah adanya masalah kesejahteraan masyarakat yang belum merata baik secara materil maupun spiritual serta masalah kesenjangan pembangunan antar desa, antar wilayah dan antar kota. Untuk mengatasi masalah tersebut pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan paradigma membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Program tersebut dilaksanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kurang merata (Prasetyo 2017). Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa melalui penyaluran dana desa sebagai bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk itu pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang di maksud adalah Dana Desa (Abidin, 2015). Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu

yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Kecamatan Gemeh adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan Talaud, tepatnya terletak di pulau Karakelang. Kecamatan ini mempunyai keterbelakangan pembangunan yang sangat unik dengan aksesibilitas yang sangat sulit dilalui oleh masyarakat Talaud karena posisi letaknya yang agak jauh dari Ibukota Kabupaten yaitu Melonguane. Jika dilihat dari ketersediaan infrastruktur jalan, dari pusat/kota Kabupaten belum adanya prasarana jalan yang memadai, karena jalan yang menghubungkan antara desa satu dengan desa lainnya, bahkan dengan kecamatan lainnya belum tersentuh aspal hotmix, hanya sebatas sampai pada pengerasan. Dari segi kehidupan mata pencaharian masyarakat didominasi oleh petani, walaupun letak geografis Kecamatan Gemeh berada dipesisir pantai, namun masyarakat yang ada lebih cenderung memilih bercocok tanam sebagai sumber mata pencaharian dibandingkan menjadi nelayan. Sejak tahun 2015 Kecamatan Gemeh yang berikotakan Gemeh telah menerima bantuan pemerintah melalui penyaluran Dana Desa berdasarkan wilayah seluas 248,89 km² yang terdiri dari 15 Desa dengan Jumlah penduduk adalah 6410 jiwa dan memiliki angka kemiskinan sebesar 4.545 jiwa/1.568 kepala keluarga.

Tabel 1
Jumlah besaran Dana Desa di Kecamatan Gemeh

Desa	Tahun	Dana Desa (Rp)
Mamahan	2015	267.359.000,-
	2016	600.839.000,-
	2017	762.060.000,-
Mamahan Barat	2015	264.614.000,-
	2016	597.507.000,-
	2017	757.635.000,-
Bambung Timur	2015	257.500.000,-
	2016	591.790.000,-
	2017	746.240.000,-
Taturan	2015	264.196.000,-
	2016	596.892.000,-
	2017	707.400.000,-
Gemeh Wantane	2015	259.498.000,-
	2016	589.954.000,-
	2017	749.189.000,-
Gemeh Raamata	2015	262.662.400,-
	2016	537.033.000,-
	2017	754.000.000,-

Arangkaa	2015	254.500.000,-
	2016	600.701.000,-
	2017	761.897.000,-
Taruan	2015	265.812.000,-
	2016	597.716.000,-
	2017	759.550.000,-
Bannada	2015	263.704.000,-
	2016	598.995.000,-
	2017	756.149.000,-
Lahu	2015	278.140.000,-
	2016	615.471.000,-
	2017	779.359.000,-

Sumber data : Kepala desa

Tabel 1 menjelaskan bahwa masing-masing desa di kecamatan Gemeh mengalami perkembangan Dana Desa terhitung tahun 2015 meningkat sampai pada tahun 2017 diantaranya Desa Mamahan dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar 267.359.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp762.060.000,- Desa Mamahan Barat dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 264.614.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 757.635.000,-, Desa Bambang Timur dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 257.500.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 746.240.000, Desa Taturan dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 264.196.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 707.400.000,- Desa Gemeh Wantane dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 259.498.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 749.189.000,- Desa Gemeh Raamata dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 262.662.400,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 754.000.000,- Desa Arangkaa dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 254.500.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 761.897.000,- Desa Taruan dengan dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 265.812.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 759.550.000,- Desa Bannada dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 263.704.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 756.149.000,- Desa lahu dengan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 278.140.000,- meningkat sampai pada tahun 2017 sebesar Rp 779.359.000,-

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa Kecamatan Gemeh ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, hal ini disebabkan oleh karena kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa di kecamatan Gemeh pada umumnya masih sangat rendah serta sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan (Ariffin dan Tahir 2006:96), oleh karena itu sebagai lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada perangkat desa agar dapat mengelola Dana Desa secara efisien, ekonomis,

efektif serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Desa

Pembangunan desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Bab IX tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaaan menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pembangunan desa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu

1. Tahapan perencanaan, dimana perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun.
2. Tahapan pelaksanaan, dimana seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong.
3. Tahapan pengawasan. Dalam tahapan ini masyarakat juga berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam musyawarah desa karna dalam musyawarah desa pemerintah diwajibkan untuk memberi informasi secara terbuka tanpa ditutupi atas pelaksanaan berlangsungnya proses pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi masyarakat dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Pengertian Dana desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinyu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo (2014:1).

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan,

atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012). Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didasarkan pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber/objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil studi keputusan maupun publikasi resmi dari berbagai instansi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019 sampai pada tanggal 11 Maret 2019 dengan lokasi penelitian dilaksanakan di 10 Desa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu :

1. Desa Mamahan
2. Desa Mamahan Barat
3. Desa Bambang Timur
4. Desa Taturan
5. Desa Gemeh Raamata
6. Desa Gemeh Wantane
7. Desa Arangkaa
8. Desa Taruan
9. Desa Bannada
10. Desa Lahu

Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis data efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (*Abdul Hakim, 2002*).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Dana Desa pada 10 Desa di Kecamatan Gemeh menggunakan rumus sebagai berikut (*LPJ Keuangan desa Lembean/Depdagri no.690.900.327*) :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100% tetapi alangka baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan *Depdagri, Kemendagri no 690.900.327* yaitu :

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui dampak dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Gemeh dapat dianalisis secara deskriptif melalui analisis tabel yaitu menggambarkan keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Gemeh sebelum adanya dana desa dibandingkan dengan keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Gemeh sesudah adanya dana desa.

Perbandingan ini dapat kita ketahui dari setiap jawaban responden melalui penyebaran koesioner di 10 (sepuluh) desa pada kecamatan yang menjadi sample penelitian tentang efektivitas pemanfaatan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan Gemeh kabupaten kepulauan Talaud.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gemeh

Dana Desa secara ideal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di desa. Hal tersebut didasarkan pada manfaat dana desa yang digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur desa seperti jalan desa, jalan pertanian,

membangun usaha desa dan lainnya sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat digunakan untuk berbagai program pembangunan tersebut diatas memiliki standar kecukupannya sendiri di masing-masing desa. Dalam diagram dibawah ini dapat dilihat bahwa 98% dari jumlah responden menyatakan anggaran dana desa yang diberikan sangat cukup untuk membiayai program pembangunan pemerintah desa kecamatan Gemeh yang telah disusun sebelumnya, dan 2% dari jumlah responden menyatakan anggaran yang diberikan cukup untuk desanya.

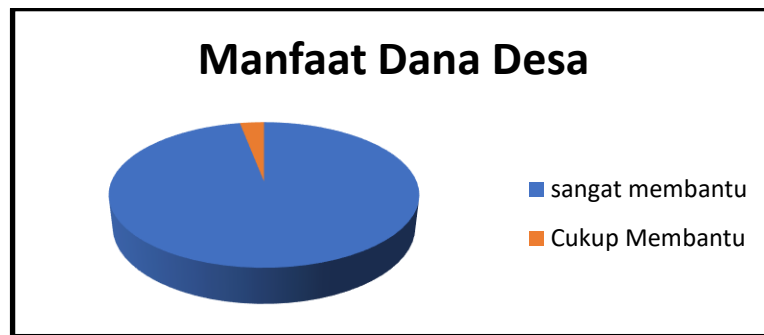
Diagram 1
Jawaban Responden tentang Kecukupan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Desa



Sumber : Data diolah, 2019

Manfaat dana desa pada akhirnya bertujuan untuk pembangunan masyarakat desa kecamatan Gemeh sehingga keberadaan dana desa menjadi anggaran yang penting untuk terus dialokasikan oleh pemerintah pusat. Sebanyak 97% dari jumlah responden menyatakan bahwa dana desa sangat membantu pelaksanaan program pembangunan pemerintah desa kecamatan Gemeh dan sebanyak 3% menyatakan bahwa anggaran tersebut cukup membantu dapat dilihat dalam diagram berikut :

Diagram 2
Jawaban Responden Tentang Dana Desa Dapat Membantu Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Desa



Sumber : Data diolah, 2019

Untuk mengetahui bagaimana dampak dana desa melalui pengumpulan data primer diantaranya di desa Mamahan, desa Mamahan Barat, desa Bambang, desa Taturan, desa Gemeh Raamata, desa Gemeh Wantane, desa Arangkaa, desa Taruan, desa Bannada dan desa Lahu terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan gemeh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Jawaban Responden Yang Setuju Dan Sangat Setuju Tentang Dana Desa Dapat Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Aspek yang dinilai	Desa	Jumlah	Persentase (%)
Apakah dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	Mamahan	10	100%
	Mamahan Barat	10	100%
	Bambang	9	90%
	Taturan	10	100%
	Gemeh Raamata	10	100%
	Gemeh Wantane	10	100%
	Arangkaa	10	100%
	Taruan	9	90%
	Bannada	10	100%
	Lahu	9	90%
Jumlah		97	97%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa 97% dari seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dengan adanya dana desa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini berarti bahwa pendapatan masyarakat meningkat ketika dana desa diberikan oleh pemerintah untuk desa-desa termasuk 10 desa yang ada di kecamatan Gemeh.

Tabel 3
Jawaban Responden Yang Setuju Dan Sangat Setuju Tentang Dana Desa Dapat Meningkatkan Pendidikan Masyarakat

Aspek yang dinilai	Desa	Jumlah	Persentase (%)
--------------------	------	--------	----------------

Apakah dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pendidikan masyarakat	Mamahan	10	100%
	Mamahan Barat	10	100%
	Bambung	10	100%
	Taturan	9	90%
	Gemeh Raamata	10	100%
	Gemeh Wantane	10	100%
	Arangkaa	10	100%
	Taruan	9	90%
	Bannada	10	100%
	Lahu	8	80%
Jumlah		96	96%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa 96% dari seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dengan adanya penyaluran dana desa oleh pemerintah dapat meningkatkan pendidikan masyarakat desa di kecamatan Gemeh, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya sarana-sarana pendidikan dan sekolah yang dibangun seperti pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) .

Tabel 4
Jawaban Responden Yang Setuju Dan sangat Setuju Tentang Dana Desa Dapat Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Aspek yang dinilai	Desa	Jumlah	Persentase (%)
Apakah dengan adanya dana desa dapat meningkatkan kesehatan masyarakat	Mamahan	9	90%
	Mamahan Barat	10	100%
	Bambung	10	100%
	Taturan	10	100%
	Gemeh Raamata	9	90%
	Gemeh Wantane	10	100%
	Arangkaa	10	100%
	Taruan	9	90%
	Bannada	8	80%
	Lahu	9	90%
Jumlah		94	94%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa 94% dari seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dengan adanya dana desa dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa, polindes dan posyandu yang ada di kecamatan Gemeh.

Tabel 5

Jawaban Responden Yang Setuju Dan Sangat Setuju Tentang Dana Desa Dapat Menyerap Tenaga Kerja

Aspek yang dinilai	Desa	Jumlah	Persentase (%)
Apakah dengan adanya dana desa dapat menyerap tenaga kerja	Mamahan	9	90%
	Mamahan Barat	10	100%
	Bambung	10	100%
	Taturan	10	100%
	Gemeh Raamata	10	100%
	Gemeh Wantane	10	100%
	Arangkaa	10	100%
	Taruan	9	90%
	Bannada	10	100%
	Lahu	9	90%
Jumlah		97	97%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa 97% dari seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dana desa mampu menyerap tenaga kerja melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan produksi desa, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa dan sarana prasarana lainnya yang ada di desa-desa pada kecamatan Gemeh.

Tabel 6
Jawaban Responden Yang Setuju Dan Sangat Setuju Tentang Sosialisasi Dana Desa Kepada Masyarakat

Aspek yang dinilai	Desa	Jumlah	Persentase (%)
Apakah dana desa selalu disosialisasikan kepada masyarakat	Mamahan	9	90%
	Mamahan Barat	10	100%
	Bambung	10	100%
	Taturan	10	100%
	Gemeh Raamata	9	90%
	Gemeh Wantane	10	100%
	Arangkaa	9	90%
	Taruan	9	90%
	Bannada	10	100%
	Lahu	9	90%
Jumlah		95	95%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 6 menunjukkan bahwa 95% dari seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dana desa mampu menunjang pembangunan masyarakat desa yang ada di kecamatan Gemeh karena diringi dengan adanya program sosialisasi oleh pemerintah dalam hal penyaluran dana desa sehingga meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa.

Tabel 7
Jawaban Responden Yang Setuju Dan Sangat Setuju Tentang Dana Desa Dapat Meningkatkan Pembangunan Masyarakat

Aspek yang dinilai	Desa	Jumlah	Persentase (%)
Apakah dengan adanya dana desa dapat meningkatkan pembangunan masyarakat	Mamahan	10	100%
	Mamahan Barat	10	100%
	Bambung	10	100%
	Taturan	9	90%
	Gemeh Raamata	10	100%
	Gemeh Wantane	10	100%
	Arangkaa	10	100%
	Taruan	9	90%
	Bannada	10	100%
	Lahu	9	90%
Jumlah		98	98%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 7 menunjukkan bahwa 98% dari seluruh responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya pendidikan masyarakat, meningkatnya kesehatan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan, secara umum telah menjelaskan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan masyarakat desa yang ada di kecamatan Gemeh.

Pembahasan

Hasil penelitian menyatakan bahwa dana desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat disemua desa yang menjadi sampel penelitian di kecamatan Gemeh kabupaten kepulauan Talaud diantaranya desa Mamahan, desa Mamahan Barat, desa Bambang Timur desa Taturan, desa Gemeh Raamata, desa Gemeh Wantane, desa Arangkaa, desa Taruan, desa Bannada dan desa Lahu. Hasil penelitian ini cocok dengan teori Mosher (1987), yang berpendapat bahwa hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Dengan tersedianya dana desa maka berbagai aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar dan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi tersebut mampu meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat.

Selain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, penyaluran dana desa juga mampu meningkatkan pendidikan masyarakat, sesuai teori Todaro dan Stephen C. Smith (2006), yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, diantaranya peningkatan pendidikan. Dengan adanya penyaluran dana desa oleh pemerintah, tingkat pendidikan masyarakat desa di kecamatan Gemeh pun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya sarana-sarana pendidikan dan sekolah yang dibangun seperti pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat desa di kecamatan Gemeh maka mampu menunjang dalam perkembangan desa dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat.

Peningkatan kesehatan masyarakat desa kecamatan Gemeh juga merupakan salah satu dampak dari penyaluran dana desa. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa, polindes dan posyandu yang ada di kecamatan Gemeh. Hasil penelitian ini sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang tersebut di atas dapat kita cermati bahwa salah satu ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan kesehatan.

Penyaluran dana desa oleh pemerintah ternyata mampu menyerap tenaga kerja disemua desa yang menjadi sampel penelitian di kecamatan Gemeh kabupaten kepulauan Talaud diantaranya desa Mamahan, desa Mamahan Barat, desa Bambang Timur desa Taturan, desa Gemeh Raamata, desa Gemeh Wantane, desa Arangkaa, desa Taruan, desa Bannada dan desa Lahu. Hal ini dapat dilihat melalui pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan jalan produksi desa, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa dan sarana prasarana lainnya yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat desa di kecamatan Gemeh semakin meningkat.

Pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat desa dalam hal penyaluran dana desa sehingga dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa. Dengan demikian dana desa dapat di manfaatkan dengan baik sesuai tujuan penggunaan dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Hasil evaluasi secara langsung menyatakan bahwa dana desa mampu memberikan peningkatan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat, menyerapan tenaga kerja serta mampu meningkatkan pembangunan desa di kecamatan Gemeh, dari hasil evaluasi ini dapat diduga bahwa dana desa yang ada dimasing-masing desa yaitu desa Mamahan, desa Mamahan Barat, desa Bambang Timur desa Taturan, desa Gemeh Raamata, desa Gemeh Wantane, desa Arangkaa, desa Taruan, desa Bannada dan desa Lahu, mampu menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan, pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil uji efektivitas terhadap Dana Desa khususnya desa Mamahan, desa Mamahan Barat, desa Bambang Timur desa Taturan, desa Gemeh Raamata, desa Gemeh Wantane, desa Arangkaa, desa Taruan, desa Bannada dan desa Lahu kecamatan Gemeh, menunjukkan tingkat efektivitas diatas 100%. Hal ini berarti bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah di kecamatan Gemeh berjalan secara sangat efektif.
2. Dari hasil sampel melalui penyebaran koesioner, responden yang ada di desa Mamahan, desa Mamahan Barat, desa Bambang Timur desa Taturan, desa Gemeh Raamata, desa Gemeh Wantane, desa Arangkaa, desa Taruan, desa Bannada dan desa Lahu menyatakan bahwa efektivitas dana desa yang disalurkan pemerintah di kecamatan Gemeh ternyata mampu memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Gemeh melalui peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang dapat menekan angka pengangguran, diringi pelaksanaan program sosialisasi penyaluran dana desa yang berjalan dengan baik sehingga dana desa dapat di manfaatkan dengan baik sesuai tujuan penggunaannya.

Saran

1. Bagi pemerintah desa
Penyaluran dana desa merupakan salah satu program pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menerapkan paradigma membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan maka diharapkan kepada kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk mampu memahami tujuan dari pemerintah pusat agar pembangunan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Bagi masyarakat
Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat agar selalu aktif mendukung program pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan yang memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat tercapai.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan pembelajaran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dimasa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Adi, Febri Prasetyo. 2017. *Sains Undercover: Memahami apa yang Tersembunyi dari Sains dengan Cara Lain*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Tahir, Arifin. 2006. *Kebijakan Publik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika. Aditama.
- Todaro (2003), *Pembangunan ekonomi Cetakan Pertama*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.